

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak aspek utama dalam pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan berbagai dimensi kehidupan sosial dan ekonomi. Baik bagi negara berkembang maupun maju, pencapaian pembangunan nasional menjadi hal sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, manusia berperan sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja yang berkontribusi langsung terhadap proses pembangunan. Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memadai (Borgan Bonerri et al., 2018).

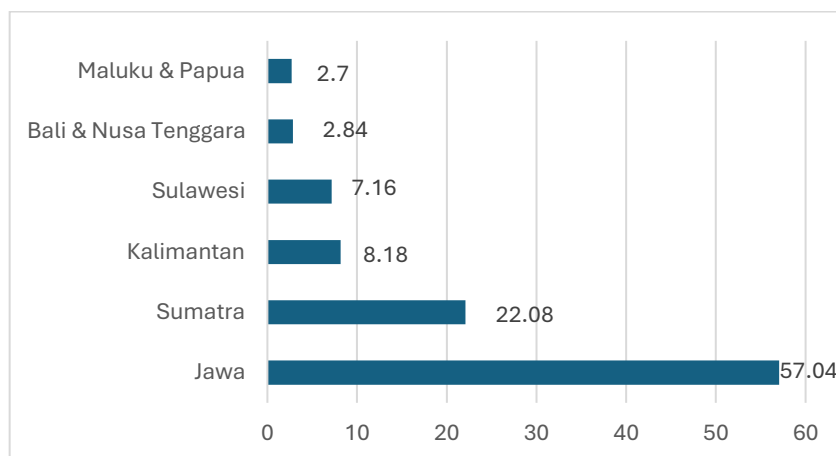
Dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, produktivitas memiliki peran penting dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Model Solow menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja memungkinkan perekonomian menghasilkan *output* yang lebih besar dengan jumlah tenaga kerja yang relatif sama (Mankiw, 2007).

Pembangunan nasional merupakan upaya yang digunakan untuk meningkatkan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan

indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Ketenagakerjaan merupakan salah satu fokus dari pemerintah yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menjadikan salah satu tujuan dari pembangunan nasional (Mahfuds & Yuliana et al., 2022).

Menurut *World Population Review*, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah populasi terbesar ke empat di dunia yang berarti bahwa sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia sangat banyak, dengan sumber daya manusia yang banyak dapat membantu Indonesia untuk terus menjadi negara maju. Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia tidak hanya memiliki jumlah yang banyak akan tetapi memiliki kualitas yang baik (Marsha et al., 2019).

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDB merepresentasikan aktivitas ekonomi secara agregat yang bersumber dari total pendapatan masyarakat serta keseluruhan pengeluaran yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa (Munim et al., 2024). Berikut merupakan data kontribusi PDB menurut pulau di Indonesia pada tahun 2024 disajikan pada gambar 1.1



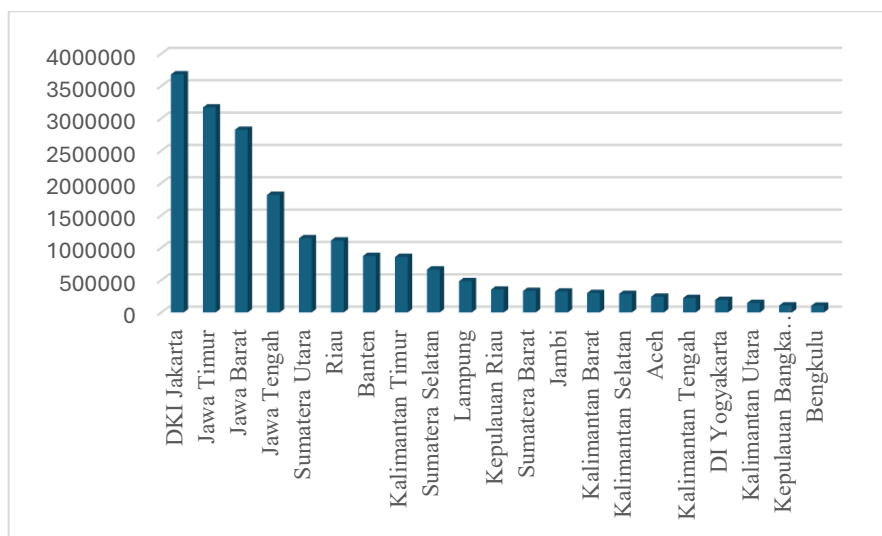
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 1 Kontribusi PDRB Menurut Pulau di Indonesia Tahun 2024 (Persen)

Bedasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa data terkait dengan PDRB ke PDB, sebagai penumbang terbesar di Indonesia. Aktivitas perekonomian Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional, yaitu sebesar 57,04 persen. Kontribusi terbesar kedua berasal dari Pulau Sumatera sebesar 22,08 persen, diikuti oleh Pulau Kalimantan sebesar 8,15 persen. Sementara itu, kontribusi PDB terendah tercatat di wilayah Maluku dan Papua yang hanya menyumbang sekitar 2,70 persen. Perbedaan kontribusi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan regional dalam distribusi aktivitas ekonomi antar wilayah di Indonesia. Meningkatnya PDRB dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja (Warapsari et al., 2020).

Tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja berpotensi mendorong pembangunan ekonomi karena ketersediaan tenaga kerja yang besar dapat meningkatkan nilai tambah dalam proses produksi nasional, terutama apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Sebaliknya, rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menjadi kendala pembangunan

karena keterbatasan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan (Ameliyah et al., 2012). Berikut merupakan data Produk Domestik Regional Bruto provinsi menurut Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan di Indonesia pada tahun 2024 disajikan pada gambar 1.1



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 2 PDRB Menurut Provinsi Pulau Jawa, Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan Tahun 2024 (Miliar Rupiah)

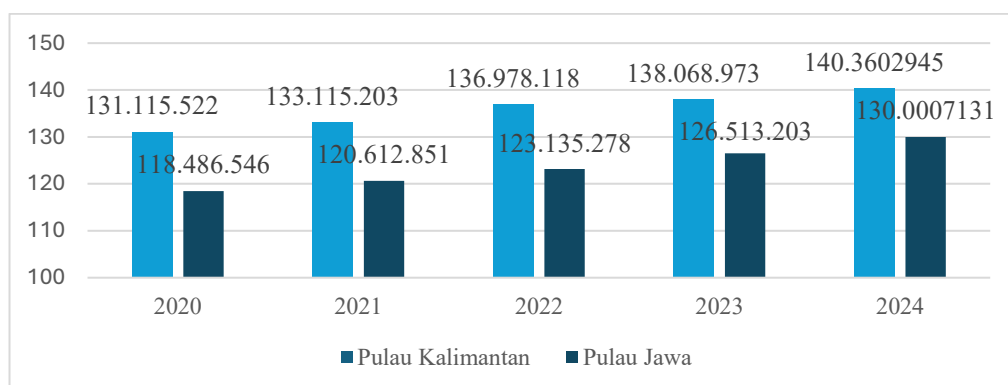
Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang relatif lebih tinggi dibandingkan Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan di Indonesia. Tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan kualitas tenaga kerja yang baik, aktivitas ekonomi yang intensif serta peran tenaga kerja yang signifikan dalam proses produksi. Kondisi tersebut menjadikan Pulau Jawa sebagai wilayah dengan letak geografis yang strategis PDRB yang tinggi seharusnya Pulau Jawa memiliki produktivitas yang tinggi pula, namun demikian nyatanya tingkat produktivitas

tenaga kerja di Pulau Jawa masih rendah sehingga peneliti tertarik meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja di Pulau Jawa.

Produktivitas tenaga kerja merupakan faktor penting dalam mendorong keberhasilan suatu usaha, mencerminkan jiwa semangat seseorang yang tercermin dalam sikap dan mental dengan bekerja yang baik. Produktivitas tenaga kerja didefinisikan sebagai sikap dan etos kerja yang mendorong peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas tenaga kerja dalam menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan (Kementerian Ketenagakerjaan, 2023). Dalam perspektif makroekonomi, produktivitas diukur melalui perbandingan antara *output* dan *input*, di mana *output* direpresentasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan *input* berupa jumlah tenaga kerja yang bekerja. Tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini memilih produktivitas tenaga kerja sebagai objek penelitian karena produktivitas mencerminkan efisiensi penggunaan *input* tenaga kerja dalam menghasilkan *output* ekonomi. Dengan PDRB yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Sebagai pusat perekonomian nasional, Pulau Jawa memiliki dinamika ekonomi yang kompleks dan karakteristik antarprovinsi yang berbeda, sehingga menarik untuk dianalisis lebih lanjut.

Produktivitas tenaga kerja merupakan faktor fundamental dalam perekonomian karena mencerminkan efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi. Peningkatan produktivitas dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi biaya dan daya saing ekonomi. Produktivitas yang tinggi berdampak langsung pada efisiensi proses produksi dan struktur biaya, yang pada akhirnya berperan penting dalam meningkatkan daya saing nasional di pasar internasional (Mukhlisiana & Adry et al., 2021). Berikut data produktivitas tenaga kerja di Pulau Jawa 2020- 2024 disajikan pada gambar 1.3.



Sumber: Pusdatik Kementerian Ketenagakerjaan

Gambar 1. 3 Rata- Rata Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah/ Tenaga Kerja)

Berdasarkan Gambar 1.3 menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas tenaga kerja di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa pada periode 2020-2024 per tahun menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Pulau Kalimantan tercatat sebagai wilayah dengan rata-rata produktivitas tenaga kerja tertinggi dan cenderung mengalami peningkatan, dari sekitar 131 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 140 juta rupiah pada tahun 2024. Wilayah Pulau Jawa memiliki rata-rata

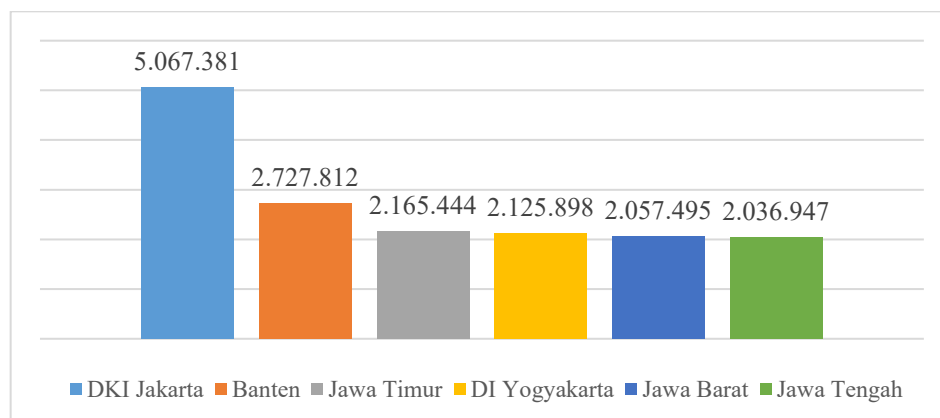
meningkat dengan kenaikan yang tidak besar. Meskipun Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian nasional dengan kontribusi PDRB terbesar, tingkat produktivitas tenaga kerja di wilayah ini relatif rendah dibandingkan Pulau Kalimantan. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti hubungan PDRB dengan penyerapan tenaga kerja secara agregat, namun belum mengkaji secara mendalam faktor-faktor penentu produktivitas tenaga kerja di Pulau Jawa dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik antarprovinsi.

Ketimpangan produktivitas tenaga kerja tersebut berpotensi menghambat peningkatan pendapatan regional dan pada akhirnya dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis pada pemahaman faktor-faktor penentu produktivitas tenaga kerja di Pulau Jawa. Salah satu faktor penting yang memengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah tingkat upah minimum, yang memiliki hubungan timbal balik dengan produktivitas, di mana peningkatan upah cenderung mendorong peningkatan kualitas dan kinerja tenaga kerja (Chairunnisa & Juliannisa *et al.*, 2022).

Pulau Jawa memegang peran strategis sebagai motor utama perekonomian nasional, yang dicerminkan oleh tingginya kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap PDB Indonesia. Namun, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh output regional ini menyisakan sektor ketenagakerjaan. Fenomena di Pulau Jawa menunjukkan adanya ketimpangan produktivitas tenaga kerja beberapa provinsi dengan pangsa PDRB terbesar justru mencatat tingkat produktivitas yang relatif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ekspansi

ekonomi regional cenderung bersifat bertumpu pada kuantitas tenaga kerja dan skala ekonomi bukan berbasis pada kualitas dan efisiensi tenaga kerja. Ketidaksesuaian antara besaran agregat PDRB dan capaian produktivitas ini mengonfirmasi adanya permasalahan struktural dalam pasar tenaga kerja serta alokasi faktor produksi di wilayah Pulau Jawa.

Kebijakan upah minimum bertujuan untuk melindungi kesejahteraan tenaga kerja serta meningkatkan taraf hidup pekerja tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha dan stabilitas perekonomian. Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan batas upah bulanan terendah yang mencakup upah pokok dan tunjangan tetap, yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi (Fadillah *et al.*, 2020). Berikut data Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa tahun 2024 pada gambar 1.4.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 4 UMP di Pulau Jawa Tahun 2024 (Rupiah)

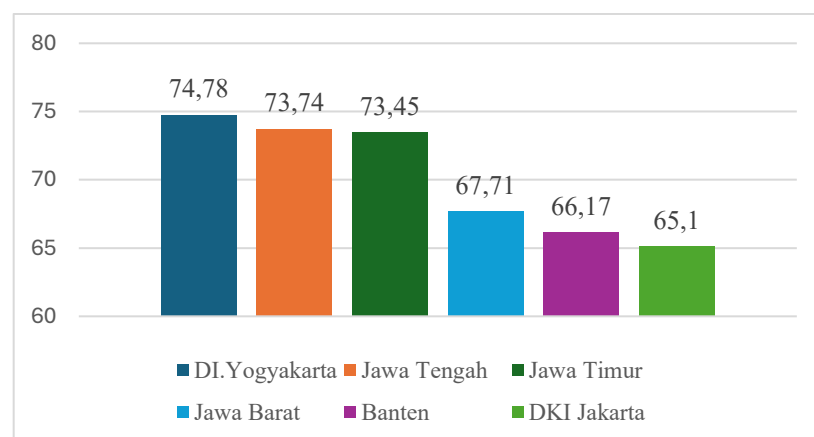
Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi tertinggi di Pulau Jawa terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.067.381 rupiah. Kondisi ini dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi pusat nasional keberadaan

industri dan perusahaan besar yang mendorong tingginya permintaan tenaga kerja, yang berskala nasional meningkatkan permintaan tenaga kerja formal dengan kuantitas tertentu sehingga tingkat upah yang ditawarkan cenderung lebih tinggi. Banten Rp2.727.812 rupiah menempati posisi kedua karena dipengaruhi oleh kedekatan geografis dengan DKI Jakarta serta perkembangan kawasan manufaktur dan logistik yang cukup pesat. Provinsi Jawa Timur Rp2.165.444 rupiah menempati ketiga dengan dipengaruhi oleh luasnya kawasan industri dan tingginya aktivitas ekonomi. Disisi lain, DI Yogyakarta Rp2.125.898 juta rupiah, kemudian Jawa Barat Rp2.057.495 rupiah, sedangkan Jawa Tengah dengan jumlah upah minimum provinsi sebesar Rp2.036.947 rupiah. Kondisi ini mengindasikan bahwa produktivitas tenaga kerja di Pulau Jawa masih menunjukkan kesenjangan, Dimana kondisi upah minimum provinsi yang lebih besar umumnya didukung oleh kondisi pusat ekonomi yang luas, serta peluang kegiatan per ekonomian yang lebih besar.

Peningkatan nilai upah minimum berpotensi mendorong produktivitas tenaga kerja, karena tingkat upah yang layak dan adil dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kondisi tersebut memberikan insentif bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mendorong peningkatan motivasi dan kinerja kerja yang pada akhirnya berimplikasi pada meningkatnya produktivitas tenaga kerja (Candra et al., 2019). Namun demikian, kesesuaian tingkat upah tidak selalu diikuti oleh peningkatan produktivitas apabila tenaga kerja masih didominasi oleh individu dengan keterampilan dan tingkat pendidikan yang terbatas. Tingkat upah tenaga kerja memiliki hubungan erat dengan produktivitas

tenaga kerja. Hal ini didukung oleh penelitian Rahmi & Riyanto (2022) yang mengemukakan bahwa upah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Sari & Oktora et al., 2021) yang menyimpulkan bahwa peningkatan upah secara signifikan mampu mendorong produktivitas tenaga kerja.

Selain upah, produktivitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh karakteristik tenaga kerja itu sendiri, salah satunya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tenaga kerja merupakan faktor produksi utama yang berperan dalam menentukan kelancaran dan efisiensi proses produksi (Dirgantara & Santoso et al., 2024). Peningkatan TPAK berpotensi meningkatkan kapasitas produksi suatu wilayah apabila diimbangi dengan kualitas dan pemanfaatan tenaga kerja yang optimal. Berikut data tingkat partisipasi angkatan kerja di Pulau Jawa tahun 2024 pada gambar 1.5.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 5 TPAK di Pulau Jawa tahun 2024 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.5 menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur

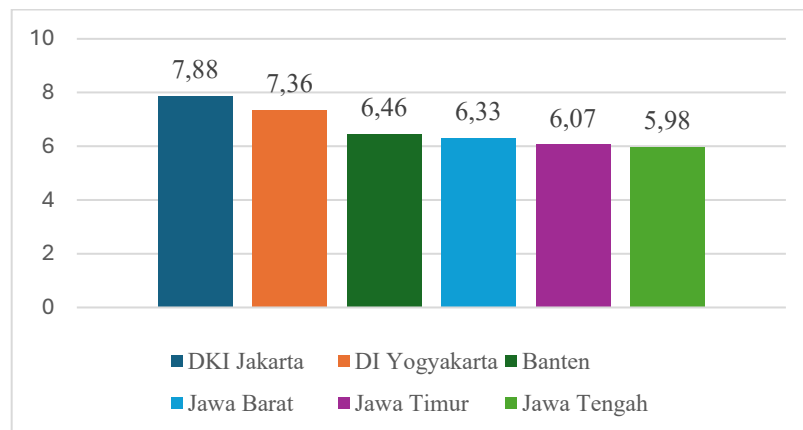
persentase penduduk usia kerja (15–64 tahun) yang aktif secara ekonomi. Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta 74,78 persen memiliki nilai yang lebih tinggi yang mencerminkan keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. Kondisi ini dipengaruhi oleh domisili sektor informal seperti perdagangan, jasa dan usaha kecil yang relatif mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak (Badan Pusat Statistik, 2024). Provinsi Jawa Tengah tertinggi kedua sebesar 73,74 persen karena memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor padat karya seperti pertanian, serta industri pengolahan, yang mendorong keterlibatan tenaga kerja. Diposisi ketiga provinsi Jawa Timur sebesar 73,45 persen memiliki keragaman sektor ekonomi pertanian, industri serta jasa. Disisi lain, Jawa Barat 67,71 persen, kemudian Banten 66,17 sedangkan yang terendah DKI Jakarta 65,1 persen

DKI Jakarta menunjukkan Tingkat partisipasi Angkatan kerja yang relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Hal ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik pasar tenaga kerja perkotaan yang relatif formal, tingginya persaingan kerja, serta persyaratan pendidikan dan keahlian yang lebih ketat. Selain arus migrasi masuk penduduk usia kerja yang tidak sepenuhnya tercatat secara statistik menyebabkan sebagian pekerja informal dan pencari kerja belum terakomodasi dalam pendataan angkatan kerja (Gatiningsih, 2020). Provinsi Banten berada pada kategori menengah di Pulau Jawa, kondisi ini mencerminkan peran sektor industri dan jasa menyerap tenaga kerja. Namun ketimpangan kesempatan kerja dan dominasi sektor informal di wilayah penyanggah perkotaan

masih menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di provinsi tersebut (Badan Pusat Statistik, 2024).

Secara keseluruhan, perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja antarprovinsi di Pulau Jawa mencerminkan variasi struktur ekonomi dan karakteristik pasar tenaga kerja di masing-masing daerah. Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja tidak selalu menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang optimal. Kondisi tersebut dapat disertai dengan tingkat produktivitas dan perlindungan tenaga kerja yang relatif rendah. Antara tingkat partisipasi angkatan kerja dan produktivitas tenaga kerja menunjukkan hasil saling memiliki keterkaitan. Dan temuan yang sama menyatakan bahwa TPAK memiliki hubungan positif signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja dikemukakan Choudhry (2009).

Selain itu, kemajuan teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia ketenagakerjaan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Pemanfaatan teknologi dalam proses produksi mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, sehingga *output* dapat meningkat dengan jumlah *input* yang relatif sama (Ningsih et al., 2024). Berikut data IP-TIK Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) di Pulau Jawa tahun 2024 pada gambar 1.6.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 6 Teknologi (IP- TIK) di Pulau Jawa Tahun 2024 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.6 Teknologi diambil dari Indeks Pembangunan-Teknologi Informasi dan Komunikasi menunjukkan bahwa di Pulau Jawa pada tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan sebagai indikator kemajuan teknologi. Provinsi DKI Jakarta sebesar 7,88 persen mencerminkan peran wilayah sebagai pusatkegiatan ekonomi, pemerintahan, dan digital nasional. Ketersediaan infrastruktur TIK yang relatif merata, serta intensitas penggunaan teknologi dalam berbagai sektor. Diikuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 7,36 persen yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah pusat Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Dan terakhir provinsi Banten sebesar 6,46 persen menunjukkan adanya perkembangan pemanfaatan teknologi yang mendorong wilayah dengan perluasan telekomunikasi meningkatkan akses internet. Tingginya capaian IP-TIK diketiga wilayah tersebut didukung oleh kinerja yang relatif unggul pada tiga sub indeks utama pembangunan TIK, yaitu sub indeks akses dan infrastruktur, sub indeks penggunaan, dan sub indeks keahlian (Untari *et al.*, 2020). Disisi lain, Jawa Barat 6,33 persen, kemudian Jawa Timur 6,07 persen sedangkan yang terendah Jawa Tengah 5,98 persen.

Kondisi ini mencerminkan peran strategis IP-TIK dalam peningkatan efisiensi kerja, memperkuat koordinasi, dan memperluas akses terhadap sistem digital. Secara teoritis, kemajuan teknologi berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui optimalisasi proses kerja dan pemanfaatan teknologi dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian, peningkatan IP-TIK belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan tenaga kerja di seluruh wilayah, meningkatkan literasi digital dan keterampilan penduduk dalam memanfaatkan teknologi masih perlu ditingkatkan agar dampak teknologi terhadap produktivitas tenaga kerja dapat lebih optimal (Adristi & Munaf et al., 2024).

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, seperti upah minimum provinsi sebagai upah gaji, teknologi sebagai indikator indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi seberapa cepat perkembangan antar wilayah, Sebagian studi tersebut masih memiliki keterbatasan. Penelitian ini tersedia umumnya dilakukan pada lingkup wilayah tertentu, misalnya per Indonesia secara cross-section dalam satu periode. Akibatnya, pemahaman mengenai variasi dan dinamika produktivitas tenaga kerja antara wilayah dalam jangka Panjang waktu yang lebih Panjang masih belum ter gambarkan secara komprehensif, terutama pada level regional Pulau Jawa.

Kesenjangan penelitian ini semakin terlihat Ketika dikaitkan dengan kondisi empiris Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa. Data menunjukkan adanya perbedaan tingkat produktivitas yang cukup mencolok antara provinsi, dimana DKI Jakarta dan Banten cenderung tinggi. Perbedaan produktivitas

tersebut juga sejalan dengan ketimpangan tingkat upah berpotensi memengaruhi motivasi dan kinerja tenaga kerja, sementara variasi tingkat partisipasi angkatan kerja mencerminkan struktur pasar tenaga kerja yang berbeda. Di sisi lain, kemajuan teknologi berperan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja melalui optimalisasi proses produksi. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa karakteristik dan Tingkat tenaga kerja antara wilayah belum merata di Pulau Jawa memiliki perbedaan yang dipengaruhi kecepatan kerja dalam produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami peran faktor-faktor produktivitas tenaga kerja, khususnya upah, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan teknologi dalam membentuk Tingkat produktivitas kerja di Pulau Jawa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum provinsi, Tingkat partisipasi Angkatan kerja dan teknologi terhadap produktivitas tenaga kerja dengan menggunakan pendekatan data panel pada tahun 2018-2024. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan Gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika perekonomian serta perbedaan antara provinsi di Pulau Jawa dari waktu ke waktu. Dengan Demikian, penelitian ini mengangkat judul **Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Teknologi terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2018-2024.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan menjadi dasar dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Teknologi secara parsial terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa tahun 2018-2024?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Teknologi secara simultan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa tahun 2018-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis serta mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Teknologi secara parsial terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa tahun 2018-2024?
2. Menganalisis serta mengetahui pengaruh pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Teknologi secara simultan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa tahun 2018-2024?

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi ketenagakerjaan, dengan memperluas kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas tenaga kerja. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai variabel independen yang belum banyak diteliti dalam analisis produktivitas tenaga kerja di tingkat regional.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memahami teoretis mengenai peran partisipasi angkatan kerja dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji produktivitas tenaga kerja, khususnya di wilayah Pulau Jawa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti sehingga wawasan dan pengetahuan baik dalam teori maupun aplikasinya. Secara teori dapat memperdalam pemahaman ilmu yang diperoleh pada saat perkuliahan dan aplikasinya diharapkan dapat mengetahui tentang pengaruh upah minimum provinsi, Tingkat partisipasi Angkatan kerja, dan teknologi terhadap produktivitas tenaga kerja di Pulau Jawa, sehingga dapat membandingkan antara teori yang penulis dapat dengan kenyataan yang ada dilapangan.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan khususnya di Pulau Jawa dalam menangani masalah produktivitas tenaga kerja.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pulau Jawa enam provinsi di Indonesia diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Tabel 1. 1 Matriks Jadwal Penelitian

[illegible]